

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu masalah yang menarik untuk dikaji berkaitan dengan kegiatan perkantoran, baik perkantoran pemerintah atau swasta adalah efisiensi kerja pegawai. Efisiensi perlu dijadikan sebagai dasar pemikiran, ukuran baku, dan tujuan pokok bagi semua pelaksanaan kerja perkantoran agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan maksimal dan memuaskan. Salah satu instansi pemerintah yang dituntut untuk bekerja dengan efisien adalah Pemerintahan Kota Cimahi.

Pemerintahan Kota Cimahi adalah sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan pelayanan bagi masyarakat kota Cimahi yang mengutamakan kepentingan masyarakat, untuk merealisasikan misi kota Cimahi tahun 2012 – 2017 yang salah satunya mewujudkan kreativitas dalam segala bidang dan meningkatkan kemampuan dalam menanggapi tantangan, tuntutan dan kondisi masyarakat secara cepat. Pada saat ini, efisien kerja di Pemerintahan Kota Cimahi menjadi kemampuan yang paling penting untuk dimiliki oleh setiap pegawai untuk melakukan pekerjaan, terutama dalam melayani masyarakat, meskipun masih ditemukan beberapa kegiatan pekerjaan kantor yang kurang efisien dalam proses pengadaan barang atau jasa bagi keperluan bekerja di kantor diantaranya adalah

Meliputi masalah waktu dan biaya. Sehubungan dengan efisiensi kerja, Sedarmayanti (2001:112) mengemukakan definisi bahwa :

Efisiensi Kerja merupakan pelaksanaan cara-cara tertentu dengan tanpa mengurangi tujuannya merupakan cara yang termudah mengerjakannya, termurah biayanya, tersingkat waktunya, teringan bebannya, terpendek jaraknya.

Selain itu The Liang Gie (2009:174) menyatakan bahwa Efisiensi dilihat dari segi usaha yang meliputi 5 unsur yang dapat dirumuskan lebih konkrit bahwa sesuatu cara bekerja yang efisien ialah cara yang tanpa sedikitpun mengurangi hasil yang hendak dicapai yang merupakan :

- 1) Cara yang paling mudah (tidak sulit akibat memakai banyak pikiran)
- 2) Cara yang paling ringan (artinya tidak berat karena memerlukan banyak tenaga jasmani manusia)
- 3) Cara yang paling cepat (tidak lama dikarenakan memakan banyak waktu)
- 4) Cara yang paling dekat (tidak jauh jaraknya dan menghamburkan ruang kerja)
- 5) Cara yang paling murah (tidak mahal akibat terlampau boros penggunaan bendanya)

Berdasarkan hasil wawancara pra penelitian penulis dengan Bapak Iman Kustaman, S.Si yang merupakan ketua pokja IV pada Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) Pemerintahan Kota Cimahi pada tanggal 20 Desember 2012 dan tanggal 8 Januari 2012 bahwa ditemukan permasalahan menyangkut efisiensi kerja pegawai yang belum sesuai dengan kriteria ideal yakni 100 % yang berhubungan dengan pekerjaan proses pengadaan barang dan jasa secara konvensional/manual dalam kurun waktu 2007-2011. Berikut ini penulis akan menggambarkan berbagai fenomena belum maksimalnya efisiensi kerja pegawai dalam bidang pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara manual yang terlihat pada tabel 1.1 berikut ini:

**Anggun Ratna Asih, 2013**

Pengaruh Penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Terhadap Efisiensi Kerja Pegawai Dalam Bidang Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Di Pemerintahan Kota Cimahi  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

**Tabel 1. 1**  
**Fenomena yang Sering Muncul dari Berbagai Sumber Belum Maksimalnya Efisiensi Kerja dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa Secara Manual di Pemerintahan Kota Cimahi Tahun 2007-2011**

No	Sumber Efisiensi Kerja	Jenis Ketidak Efisienan Kerja
1.	Pikiran	Rumitnya proses pengadaan barang dan jasa karena harus berhadapan dengan pelaku usaha yang tidak profesional sehingga menguras pikiran untuk memilah-milah pelaku usaha yang menyediakan barang dan jasa yang profesional.
2.	Tenaga	Dengan tidak adanya sistem informasi yang memberikan informasi mengenai pengadaan barang dan jasa sehingga menguras tenaga untuk mencari informasi tentang pengadaan barang dan jasa secara akurat dan tepat.
3.	Waktu	Memakan banyak waktu dalam pencarian solusi untuk pengadaan barang dan jasa di kantor mengingat lamanya pengambilan keputusan dari lamanya berfikir.
4.	Ruang	Memakan banyak ruang untuk menyimpan berkas-berkas yang begitu banyak yang berhubungan dengan berkas-berkas proses pengadaan barang dan jasa untuk keperluan kantor. Sehingga ruangan penuh dengan lembaran-lembaran berkas yang menghambat kemudahan pegawai dalam bekerja
5.	Uang	Menghabiskan banyak uang untuk biaya mencetak berkas – berkas proses pengadaan barang dan jasa. Seperti biaya untuk membeli kertas, tinta, jasa kurir, jasa transportasi, biaya iklan lelang dan biaya lain sebagainya.

Sumber : Hasil wawancara pra penelitian pegawai pada bagian Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) Pemerintahan Kota Cimahi.

Berkaitan dengan fenomena belum tercapai standar efisiensi kerja pegawai dalam tabel 1.1 tersebut salah satunya dalam masalah efisiensi kerja waktu didukung pula dengan data yang diperoleh sebagai berikut :

**Anggun Ratna Asih, 2013**

Pengaruh Penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Terhadap Efisiensi Kerja Pegawai Dalam Bidang Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Di Pemerintahan Kota Cimahi  
 Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

**Tabel 1. 2**  
**Tabel Jadwal Pelaksanaan Pengadaan Pengumuman Pelanggan Sederhana**  
**Secara Manual di Pemerintahan Kota Cimahi**

No	Uraian Kegiatan	Target	2007		2008		2009	
			Realisasi	Ket	Realisasi	Ket	Realisasi	Ket
1.	Melayani pendaftaran dan pemberian dokumen pengadaan	<b>7-8 Hari</b>	8 Hari	-	8 Hari	-	7 Hari	-
2.	Pemberian Penjelasan Pengadaan kepada Penyedia	<b>2 Jam</b> (Pada Hari ke 4 dari keg. No 1)	3 Jam/lebih	<b>&gt; 1 Jam/lebih</b>	4 Jam	<b>&gt;2 Jam</b>	4,5 Jam	<b>&gt;2,5 Jam</b>
3.	Pemasukan Dokumen Penawaran	<b>5 Jam</b> (Pada Hari ke 9)	5 Jam	-	5,5 Jam	<b>1/2 &gt;Jam</b>	5 Jam	-
4.	Pembukaan Dokumen Penawaran	<b>3 Jam</b> (Pada Hari ke 9)	3 Jam	-	3 Jam	-	4 Jam	<b>&gt;1 jam</b>
5.	Evaluasi Penawaran	<b>2 Hari</b> (Pada Hari ke 9-10)	4 Hari	<b>&gt; 2 Hari</b>	4 Hari	<b>&gt; 2 Hari</b>	2 Hari	-
6.	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	<b>1 Hari</b> (Pada Hari ke 10)	2 Hari	<b>&gt; 1 Hari</b>	3 Hari	<b>&gt; 2 Hari</b>	3 Hari	<b>&gt;2 Hari</b>
7.	Pembuktian Kualifikasi	<b>1 Hari</b> (Pada hari ke 11)	1 Hari	-	1 Hari	-	1 Hari	-
8.	Pengumuman Lelang	<b>1 Hari</b> (Pada Hari ke 12)	2 Hari	<b>&gt;1 Hari</b>	2 Hari	<b>&gt; 1 Hari</b>	3 Hari	<b>&gt; 2 Hari</b>
9.	Masa Sanggah	<b>2 Hari</b> (Pada Hari ke 13-15)	5 Hari	<b>&gt;3 Hari</b>	5 Hari	<b>&gt; 3 Hari</b>	3 Hari	<b>&gt;1 Hari</b>

**Anggun Ratna Asih, 2013**

Pengaruh Penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Terhadap Efisiensi Kerja Pegawai Dalam Bidang Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Di Pemerintahan Kota Cimahi  
 Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

10.	Penerbitan SPPBJ	<b>1 Hari</b> (Pada Hari ke 16)	2 Hari	<b>&gt;1 Hari</b>	2 Hari	<b>&gt; 1 Hari</b>	2 Hari	<b>&gt;1 Hari</b>
11.	Penandatanganan Kontrak (Oleh Pihak SKPD masing-masing)	<b>14 Hari</b> (Sejak hari ke 16)	13 Hari	-	12 Hari	-	14 Hari	-
<b>Total Waktu</b>		<b>30 Hari 10 Jam</b>	<b>37 Hari 11 Jam</b>	<b>8 Hari 1 Jam</b>	<b>37 Hari 12,5 Jam</b>	<b>9 Hari 2,5 Jam</b>	<b>35 Hari 13,5 Jam</b>	<b>6 Hari 3,5 Jam</b>

Sumber : Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) Pemerintahan Kota Cimahi

**Tabel 1. 3**  
**Tabel Jadwal Pelaksanaan Pengadaan Pengumuman Pelanggan Sederhana Secara Manual di Pemerintahan Kota Cimahi**

No	Uraian Kegiatan	Target	2010		2011	
			Realisasi	Ket	Realisasi	Ket
1.	Melayani pendaftaran dan pemberian dokumen pengadaan	<b>7-8 Hari</b>	8 Hari	-	8 Hari	-
2.	Pemberian Penjelasan Pengadaan kepada Penyedia	<b>2 Jam</b> (Pada Hari ke 4 dari kegiatan no 1)	3,5 Jam/lebih	<b>&gt; 1,5 Jam/le bih</b>	2,5 Jam	<b>&gt;1/2 Jam</b>
3.	Pemasukan Dokumen Penawaran	<b>5 Jam</b> (Pada Hari ke 9)	5 Jam	-	6 Jam	<b>&gt;1 Jam</b>
4.	Pembukaan Dokumen Penawaran	<b>3 Jam</b> (Pada Hari ke 9)	4 Jam	<b>1 Jam</b>	3 Jam	-
5.	Evaluasi Penawaran	<b>2 Hari</b> (Pada Hari ke 9-10)	5 Hari	<b>&gt; 3 Hari</b>	5 Hari	<b>&gt; 3 Hari</b>

Anggun Ratna Asih, 2013

Pengaruh Penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Terhadap Efisiensi Kerja Pegawai Dalam Bidang Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Di Pemerintahan Kota Cimahi  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

6.	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	<b>1 Hari</b> (Pada Hari ke 10)	3 Hari	<b>&gt; 2 Hari</b>	4 Hari	<b>&gt; 3 Hari</b>
7.	Pembuktian Kualifikasi	<b>1 Hari</b> (Pada hari ke 11)	1 Hari	-	1 Hari	-
8.	Pengumuman Lelang	<b>1 Hari</b> (Pada Hari ke 12)	3 Hari	<b>&gt;2 Hari</b>	4 Hari	<b>&gt; 3 Hari</b>
9.	Masa Sanggah	<b>2 Hari</b> (Pada Hari ke 13-15)	6 Hari	<b>&gt;4 Hari</b>	6 Hari	<b>&gt; 4 Hari</b>
10.	Penerbitan SPPBJ	<b>1 Hari</b> (Pada Hari ke 16)	3 Hari	<b>&gt;2 Hari</b>	1 Hari	-
11.	Penandatanganan Kontrak (Oleh Pihak SKPD masing-masing)	<b>14 Hari</b> (Sejak hari ke 16)	13 Hari	-	12 Hari	-
<b>Total Waktu</b>		<b>30 Hari 10 Jam</b>	<b>42 Hari 12,5 Jam</b>	<b>13 Hari 2,5 Jam</b>	<b>41 Hari 11,5 Jam</b>	<b>13 Hari 1,5 Jam</b>

Sumber : Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) Pemerintahan Kota Cimahi

Dari tabel 1.2 dan tabel 1.3 di atas dapat terlihat bahwa dari tahun ke tahun dalam kurun waktu tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 terjadi beberapa kegiatan dalam proses pengadaan secara manual untuk paket-paket pekerjaan tertentu dengan nominal di atas 100 juta rupiah dan dalam kurun waktu tersebut dilakukan secara pelelangan sederhana mengalami keterlambatan waktu yang tidak sesuai dengan rencana target yang telah ditentukan dengan realisasi pelaksanaannya. Dari tahun 2007 terlihat kegiatan pengadaan no 2, 5, 6, 8, 9, dan 10 mengalami keterlambatan atau penambahan waktu tidak sesuai dengan target,

Anggun Ratna Asih, 2013

Pengaruh Penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Terhadap Efisiensi Kerja Pegawai Dalam Bidang Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Di Pemerintahan Kota Cimahi  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

di tahun 2008 kegiatan no 2,3,5,6, 8, 9, dan 10 yang mengalami keterlambatan atau penambahan waktu dari target waktu, sedangkan di tahun 2009 kegiatan no 2,4,6, sampai no 10 yang mengalami keterlambatan dan penambahan waktu dari target waktu, tahun 2010 no 2, 4, 5, 6, 9 dan 10 mengalami keterlambatan atau penambahan waktu, dan di tahun 2011 kegiatan no 2, 3, 5, 6, 8, dan 9 yang mengalami keterlambatan atau penambahan waktu. Keterlambatan dan penambahan waktu tersebut akan berimbas pula pada lebih banyak waktu dan tenaga yang dikeluarkan oleh pegawai dalam bekerja, dan pada akhirnya mengganggu kelancaran proses pengadaan, sehingga pekerjaan yang dilakukan kurang efisien, maka diperlukan suatu sistem kerja yang bisa membantu pegawai untuk bekerja lebih efisien terutama di bidang pengadaan barang dan jasa tersebut.

Adapun disisi pengeluaran biaya pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara manual terjadi peningkatan dalam kurun waktu 2008-2011 untuk sejumlah harga barang yang sama, dalam tabel 1.4 dibawah ini menunjukan data biaya pengadaan di unit organisasi sekretariat daerah-setda pemerintahan kota Cimahi :

**Tabel 1. 4**  
**Biaya Pengadaan Barang Unit Sekretariat Daerah-Setda Tahun 2008-2011**

No	Jenis Barang	2008			2009			2010			2011		
		B	HS	Tot	B	HS	Tot	B	HS	Tot	B	HS	Tot
1	Printer	1	1.265.000	1265000	2	5940000	11880000	2	3003000	6006000	6	1350000	8100000
2	Filling Besi/Metal	4	3575000	14300000	2	3630000	7260000	10	3300000	33000000	5	2750000	13750000
3	Note Book	3	12925000	38775000	2	19800000	39600000	6	11844000	71064000	3	10650000	31950000
4	Ac Split	2	6325000	12650000	4	5720000	22880000	2	6050000	12100000	2	7700000	15400000
5	PC Unit	1	8745000	8745000	1	29700000	29700000	4	7150000	28600000	20	7710000	154200000
6	Rak besi/metal	1	2612500	2612500	17	1760000	29920000	10	3465000	34650000	4	3245000	12980000
7	sepeda motor	1	1394000	1394000	1	4280000	4280000	1	2360000	2360000	1	14842000	14842000
	Jumlah												Rp. 384.800.000

Anggun Ratna Asih, 2013

Anggun Ratna Asih, 2013, Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Terhadap Efisiensi Kerja Pegawai Dalam Bidang Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Di Pemerintahan Kota Cimahi, p. 122.220.000

Sumber : Bagian Perlengkapan Pemerintahan Kota Cimahi

Keterangan :

B = Banyaknya  
 HS = Harga Satuan  
 Tot = Total

Dari tabel 1.4 di atas dapat terlihat pengeluaran biaya dari jenis-jenis barang-barang yang sama setiap tahunnya yang beberapa jenis barang mengalami peningkatan di beberapa bagian yang melaksanakan pengadaan barang tersebut yang termasuk ke dalam unit organisasi sekretariat daerah-setda. Peningkatan dalam beberapa barang yang sama tersebut dikarenakan informasi mengenai harga barang yang kurang tepat serta pengerjaan proses pengadaan yang dilakukan masih secara manual, sehingga belum optimalnya efisiensi dalam biaya pengadaan.

Merujuk pada pernyataan Devung Simon (1988:26) mengenai efisiensi yang menyatakan bahwa “ Efisiensi adalah tingkat kemampuan mencapai output tertentu dengan input yang lebih kecil, atau tingkat kemampuan mencapai output yang lebih besar dengan input yang ada. “

Berdasarkan pernyataan di atas berkenaan dengan jumlah input pegawai yang dibutuhkan di Unit Layanan Pengadaan (ULP) ditemukan pula fenomena mengenai ketidak efisienan input dengan output penempatan pegawai di Unit Layanan Pengadaan (ULP), yaitu penambahan tenaga pegawai yang sebenarnya tidak ada dalam perencanaan penempatan pegawai. Itu dikarenakan munculnya beban kerja yang lebih berat dan membutuhkan tenaga tambahan pegawai, hal tersebut didukung oleh data sebagai berikut :

**Anggun Ratna Asih, 2013**

Pengaruh Penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Terhadap Efisiensi Kerja Pegawai Dalam Bidang Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Di Pemerintahan Kota Cimahi  
 Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu



**Tabel 1. 5**  
**Rencana dan Realisasi Penempatan Pegawai di Unit Layanan Pengadaan**  
**(ULP) tahun 2007-2010**

No.	Jenis Pekerjaan	Perbandingan	
		(Rencana Penempatan Pegawai)	(Realisasi Penempatan Pegawai)
1.	Mengambil berkas-berkas dokumen pengadaan dari penyedia yang sangat banyak ke tempat penyimpanan berkas dokumen pengadaan	1 Orang	1 Orang
2.	Menyimpan, mengklasifikasi, dan merapikan berkas-berkas dokumen pengadaan ke dalam tempat berkas-berkas di simpan di lemari arsip		2 Orang
3.	Menjaga, memelihara, dan membersihkan berkas-berkas dokumen pengadaan		1 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>1 Orang</b>	<b>3 Orang</b>

Sumber : Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintahan Kota Cimahi

Pentingnya efisiensi kerja dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa di Pemerintahan Kota Cimahi, tidak hanya berdampak kepada penyelesaian pekerjaan kantor secara cepat dan tepat saja, tetapi juga akan mempengaruhi citra profesional dan kinerja dalam bekerja dan yang paling penting adalah berimplikasi kepada kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pemerintahan Kota Cimahi serta pertumbuhan pembangunannya. Memperhatikan seluruh uraian tersebut, terlihat bahwa Pemerintahan Kota Cimahi yang mengutamakan efisiensi dalam berkerja, dihadapkan pada permasalahan mengenai belum terwujudnya efisiensi kerja yang tercemin dari data tersebut. Oleh karena

**Anggun Ratna Asih, 2013**

Pengaruh Penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Terhadap Efisiensi Kerja Pegawai Dalam Bidang Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Di Pemerintahan Kota Cimahi  
 Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

itu, kondisi ini memberikan peluang kepada ilmu manajemen perkantoran untuk melakukan studi mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efisiensi kerja dalam proses pengadaan barang dan jasa. Dengan demikian efisiensi kerja dalam pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu aspek kajian penting dalam ilmu manajemen perkantoran.

Banyak faktor yang menyebabkan belum optimalnya efisiensi kerja dalam pengadaan barang dan jasa di Pemerintahan Kota Cimahi mulai dari sumber daya manusia, penerapan teknologi informasi, anggaran biaya, perencanaan waktu dan lain sebagainya. Kondisi seperti ini tentu tidak boleh dibiarkan terus terjadi, apabila dibiarkan terus terjadi akan berdampak pada menurunnya citra profesional dalam bekerja, menurunnya kinerja pegawai, pemborosan waktu dan biaya. Oleh karena itu perlu dicari jalan keluarnya, salah satunya adalah dengan menerapkan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

Mengingat Perpres 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta berkembang pesatnya teknologi informasi maka setiap instansi pemerintah daerah di Indonesia diwajibkan untuk memberikan layanan pengadaan barang dan jasa yang dibina dan dikembangkan oleh lembaga yang dibentuk tahun 2007 yang merupakan lembaga khusus pengadaan barang/jasa yang diberi nama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintahan (LKPP) yang mengembangkan aplikasi pengadaan secara elektronik yang disebut Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang dioperasikan oleh unit kerja yang diberi nama Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah unit kerja yang dibentuk di berbagai instansi dan

**Anggun Ratna Asih, 2013**

Pengaruh Penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Terhadap Efisiensi Kerja Pegawai Dalam Bidang Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Di Pemerintahan Kota Cimahi  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pemerintah daerah untuk melayani Unit Layanan Pengadaan (ULP) atau Panitia/Pokja ULP Pengadaan yang akan melaksanakan pengadaan secara elektronik (Sumber : website resmi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Cimahi). Di Pemerintahan Kota Cimahi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) telah resmi beroperasi sejak Februari 2012 dalam penggunaannya dengan mengakses ke dalam *website* Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dengan nama *website* Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Diharapkan dengan penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dapat menunjang efisiensi kerja internal organisasi yang membutuhkan untuk mengatasi ketidak efisienan kerja dalam proses pekerjaan pengadaan barang dan jasa.

Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) merupakan implementasi dari *Electronic Government Procurement* (e-GP) atau sering disebut juga *e-procurement* yang memudahkan penggunanya dalam mendapatkan barang dan jasa untuk kebutuhan organisasi. Rino A Nugroho dalam Wardiyanto dan Suaedi (2010:83) menyatakan bahwa e-GP adalah “ Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pengadaan barang dan jasa organisasi publik.”

Lebih rinci Leipod dalam Wardiyanto dan Suaedi (2010:84) membagi peran e-GP menjadi beberapa bagian yang dapat diringkas sebagai berikut :

**Tabel 1. 6**  
**Peran e-GP**

No.	Jenis Peran	Peran
1.	Meningkatkan transparansi dan keyakinan	Keberadaan e-GP yang dapat diakses melalui internet membuat pengadaan dapat dilihat oleh semua pihak yang berkepentingan, dan masyarakat. Sehingga mereka mampu mengawasi jalannya pengadaan barang/jasa oleh pemerintah. Penggunaan e-GP akan membuat syarat yang ada dalam peraturan tentang pengadaan terpenuhi, dengan demikian proses pengadaan menjadi sesuai dengan undang-undang dan meyakinkan. Selain itu pemanfaatan e-GP ini juga mengurangi kemungkinan terjadinya korupsi dalam pengadaan barang/jasa
2.	Meningkatkan kinerja dan kualitas	Implementasi e-GP mampu meningkatkan efisiensi pengadaan antara 10 – 20 % , dan akhirnya mampu mengurangi biaya (uang) pengadaan barang/jasa pemerintah.

Sumber : Leipod dalam Wardiyanto dan Suaedi (2010 : 84)

Oleh karena itu dalam upaya memahami dan memecahkan masalah fenomena belum optimalnya efisiensi kerja dalam pengadaan barang dan jasa di Pemerintahan Kota Cimahi dan hubungannya dengan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), maka diperlukan pendekatan tertentu untuk memecahkan masalah tersebut, dan berdasarkan permasalahan yang dikaji maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang berkenaan dengan pengadaan barang/jasa yaitu pengadaan yang merupakan bagian dari fungsi manajemen logistik dan efisiensi kerja yang merupakan bagian dari pendekatan ilmu administrasi perkantoran. Sedangkan *grand theory* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *grand theory e-procurement* dari Jaz Heizer dan Barry Render (2010:21). Teori *e-procurement* membahas mengenai berbagai jenis kegiatan administrasi pekerjaan yang berkaitan dengan penanganan proses pengadaan dan dengan penggunaan *e-procurement* dapat mengurangi banyaknya

**Anggun Ratna Asih, 2013**

Pengaruh Penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Terhadap Efisiensi Kerja Pegawai Dalam Bidang Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Di Pemerintahan Kota Cimahi  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pekerjaan administrasi ini. Dengan kata lain pekerjaan proses pengadaan barang dan jasa dapat di efisiensikan dengan *e-procurement*. Dengan demikian dengan penerapan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) oleh Pemerintahan Kota Cimahi akan dapat mengefisiensi kerja pegawai dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa yang menunjang kegiatan perkantoran lebih mudah untuk dikerjakan.

Mengacu kepada keseluruhan paparan di atas, dan dalam upaya memahami dan memecahkan masalah belum optimalnya efisiensi kerja pegawai dalam proses pengadaan barang dan jasa di Pemerintahan Kota Cimahi, maka perlu dan penting dilakukan penelitian tentang pengaruh Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) terhadap efisiensi kerja pegawai. Inilah yang menarik penulis untuk mengadakan penelitian, dan selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: ” **Pengaruh Penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) terhadap Efisiensi Kerja Pegawai dalam Bidang Pengadaan Barang dan Jasa pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Pemerintahan Kota Cimahi** ”.

## **1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan masalah di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan berikut:

1. Banyak faktor yang mempengaruhi efisiensi kerja seperti penggunaan sumber daya yaitu berupa *people, capital, materials, and information* (Silalahi, Uber,

Anggun Ratna Asih, 2013

Pengaruh Penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Terhadap Efisiensi Kerja Pegawai Dalam Bidang Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Di Pemerintahan Kota Cimahi  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

2011:415)

2. Penelitian ini dibatasi pada permasalahan penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dengan efisiensi kerja pegawai dalam bidang pengadaan barang dan jasa pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Pemerintahan Kota Cimahi.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, agar ruang lingkup permasalahannya jelas, maka penulis merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran tingkat efektivitas penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) di Pemerintahan Kota Cimahi ?
2. Bagaimana gambaran tingkat efisiensi kerja pegawai dalam bidang pengadaan barang dan jasa pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Pemerintahan Kota Cimahi dari penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) ?
3. Adakah pengaruh Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) terhadap efisiensi kerja pegawai dalam bidang pengadaan barang dan jasa pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Pemerintahan Kota Cimahi ?

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengungkap gambaran tentang pengaruh Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) terhadap Efisiensi Kerja Pegawai dalam bidang pengadaan barang dan jasa pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Pemerintahan Kota

**Anggun Ratna Asih, 2013**

Pengaruh Penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Terhadap Efisiensi Kerja Pegawai Dalam Bidang Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Di Pemerintahan Kota Cimahi  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Cimahi.

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pengetahuan dan melakukan kajian secara ilmiah tentang penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) terhadap efisiensi kerja pegawai bidang pengadaan barang dan jasa pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Pemerintahan Kota Cimahi.

Secara khusus, tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui gambaran tingkat efektivitas penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) di Pemerintahan Kota Cimahi.
2. Untuk mengetahui gambaran tingkat efisiensi kerja pegawai dalam bidang pengadaan barang dan jasa pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Pemerintahan Kota Cimahi dari adanya Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)
3. Untuk mengetahui terdapatnya pengaruh Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) terhadap efisiensi kerja pegawai dalam bidang pengadaan barang dan jasa pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Pemerintahan Kota Cimahi.

#### **1.4 Kegunaan Hasil Penelitian**

Setelah tujuan penelitian yang dikemukakan di atas dapat tercapai, maka dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mereka yang

**Anggun Ratna Asih, 2013**

Pengaruh Penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Terhadap Efisiensi Kerja Pegawai Dalam Bidang Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Di Pemerintahan Kota Cimahi  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

tertarik dengan kajian ini. Adapun kegunaan yang ingin dicapai yaitu berupa kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

#### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Memberikan sumbangan bagi bidang ilmu manajemen perkantoran, terutama dalam kaitannya dengan masalah Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), yang berorientasi pada pengadaan barang dan jasa. Dapat juga dijadikan dasar bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti mengenai permasalahan yang sama.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

1. Sebagai bahan informasi bagi Pemerintahan Kota Cimahi untuk dapat memahami faktor-faktor yang berkaitan dengan efisiensi kerja, sehingga dapat dikembangkan model pendekatan layanan yang efektif bagi peningkatan efisiensi kerja pegawai.
2. Sebagai sumbangan pemikiran bagi Pemerintahan Kota Cimahi mengenai efisiensi kerja pegawai.
3. Sebagai bahan masukan bagi para pengambil keputusan dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan peningkatan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
4. Sebagai sumbangan bagi para unit kerja untuk meningkatkan mutu dan efisiensi kerja individu dan organisasi, sehingga tercapai tujuan organisasi atau perusahaan.
5. Untuk mengetahui dengan pasti implikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) terhadap efisiensi kerja pegawai dalam bidang

**Anggun Ratna Asih, 2013**

Pengaruh Penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Terhadap Efisiensi Kerja Pegawai Dalam Bidang Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Di Pemerintahan Kota Cimahi  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu



pengadaan barang dan jasa pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Pemerintahan Kota Cimahi.

6. Sebagai bahan bagi pembaca atau pihak lain yang membutuhkan informasi dan data yang relevan dari hasil penelitian, khususnya mengenai Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang menunjang efisiensi kerja pegawai dalam bidang pengadaan barang dan jasa pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Pemerintahan Kota Cimahi. di Pemerintahan Kota Cimahi.

